

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TUNTAS GIZI BURUK (RESTU IBU)
DI KABUPATEN NGAWI
(Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk)**

Viska Widiatmadita Wijanarko, Sjamsiar Sjamsuddin, Hermawan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: vwidiatmadita@gmail.com

Abstract: Implementation of Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) In Kabupaten Ngawi (Study Of Implementation Regulation Of Ngawi Regent Nomor. 8 Of 2013 About The General Manual Of Treatment Against Nutrient Deficiency. The commitment of the government of Ngawi District to deal with nutrient problem in Kabupaten Ngawi in 2013 through Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk or abbreviated as Restu Ibu be based on The Regulation of Ngawi Regent Nomor. 8 of 2013 about The General Manual of Treatment against Nutrient Deficiency. The government of Kabupaten Ngawi maximizes the implementation of gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) to deal with nutrient deficiency by constructing the installation of child-based nutrient improvement at RSUD dr. Soeroto Ngawi in cooperation with Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Research method is descriptive analysis with qualitative approach. The analysis model is Miles and Huberman's qualitative study. Result of research indicates that the implementation of program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) consists of the treatment over toddlers with nutrient deficiency and underweight cases and the improvement of nutrient status of toddlers based on General Allocation Fund (DAU) from District Budget in 2013. The program malnutrition (Restu Ibu) takes account two factors which are supporting and constraining factors involving satuan perangkat kerja daerah (SKPD) and other side.

***Keyword :** The Implementation of Program, Malnutrition, Kabupaten Ngawi.*

Abstrak: Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) Di Kabupaten Ngawi (Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk). Komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menuntaskan masalah gizi buruk pada tahun 2013 dilakukan melalui program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk). Untuk memaksimalkan pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan instalasi perbaikan gizi ramah anak di RSUD dr. Soeroto Ngawi dan Kerjasama dengan SKPD terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gerakan tuntas gizi buruk terdapat tahapan perawatan balita gizi buruk dan balita sangat kurus serta adanya bantuan untuk peningkatan status gizi balita yang menggunakan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten 2013. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat yang melibatkan SKPD dan pihak-pihak terkait.

Kata kunci: pelaksanaan program, penanganan gizi buruk, Kabupaten Ngawi

Pendahuluan

Modal utama dalam membangun sumber daya manusia di suatu negara adalah kesehatan. Sumber daya manusia bergantung pada gizi yang dimiliki oleh setiap individu, jika gizi yang dimilikinya baik tentu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Seperti yang dikatakan Krisnasari, "Gizi buruk dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia,

oleh karena itu kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi oleh bangsa dan negara" (2010, h.68). Secara langsung maupun tidak langsung gizi buruk dapat menurunkan kemampuan anak, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak serta menurunkan produktivitas. Sebelum lima tahun, otak anak mengalami perkembangan pesat, masa-masa itu

biasa disebut *golden period*. Apabila pada masa tersebut, anak sudah mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk berkepanjangan maka dampak yang akan ditimbulkan sangat besar, anak tersebut tidak dapat tumbuh secara normal.

Tidak ada organisasi yang wewenangnya mencakup seluruh kebutuhan masyarakat kecuali negara. Menurut Budiardjo (2008, h.47), menyatakan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu teritorial tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati. Oleh karena itu sudah sepantasnya negara memiliki peran yang besar untuk menangani salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian melalui suatu program.

Berdasarkan hasil pendataan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada akhir tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat nomor lima di dunia untuk angka balita kekurangan gizi dan delapan juta lebih balita Indonesia mengalami gizi buruk. Pada tahun 2013 di Jawa Timur tercatat ada sekitar 25.000 balita mengalami gizi buruk. Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi yang utama bahkan dianggap sebagai mimpi buruk yang sampai saat ini belum berakhir termasuk di Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi melaksanakan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) sehingga balita gizi buruk yang ada dapat diberikan penanganan agar status gizinya dapat meningkat menjadi lebih baik. Pada tahun 2012 telah dilakukan intervensi melalui pos gizi di 13 kecamatan dari pelaksanaan pos gizi tersebut keberhasilan dan upaya untuk meningkatkan berat badan balita sebesar 63,76 %. Pada tahun 2013 di Kabupaten Ngawi terdapat 420 balita yang menjadi sasaran program Restu Ibu, landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk. Dalam melakukan penanganan masalah gizi buruk terhadap anak diperlukan kesiapan bagi pemerintah daerah yang meliputi fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, partisipasi semua pihak (pemerintah maupun swasta, serta keterlibatan masyarakat).

Menurut Arnelia (2011, h.111), melalui kerjasama yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan penanganan pada pasien anak gizi buruk dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk itu penulis merumuskan masalah bagaimanakah pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten

Ngawi dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1991, h.67), implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk UU, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Menurut Wahab (1991, h.110) mengemukakan untuk mengimplementasikan kebijaksanaan dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Struktural (*Struktur Approach*)
Struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pola. Terdapat perbedaan-perbedaan karakteristik antara organisasi satu dengan yang lain.
- b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*)
Pendekatan ini mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memberikan secara tepat jangka waktu penyesuaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyesuaian tugas dalam jaringan kerja.
- c. Pendekatan Keperilakuan (*Behavioral Approach*)
Suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada sifat-sifat perilaku masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan yang seringkali terjadi penolakan.
- d. Pendekatan Politik (*Political Approach*)
Keberhasilan dari suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok berpengaruh untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain pendekatan ini mengacu kepada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya di lingkungan organisasi.

2. Pengertian Program

Menurut Jones (1996, h.295), mengungkapkan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu

sesorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staff, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas. Sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

3. Gizi Buruk

Gizi buruk memiliki pengaruh dalam jangka waktu yang panjang, karena dapat mempengaruhi kualitas SDM seseorang. Menurut PERSAGI (2009, h.75), Gizi buruk adalah kondisi kurang gizi dalam tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang waktu cukup lama.

4. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006, h.77), pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Menurut Suharto (2005, h.67), mengungkapkan pendekatan pemberdayaan dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

- a. Pemungkinan
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Penguatan
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan
Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan
Memberikan bimbingan dan dukungan agar

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

- e. Pemeliharaan
Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi.
 - a. Tahap perawatan balita gizi buruk dan sangat kurus
 - b. Bantuan untuk peningkatan status gizi balita gizi buruk
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi.

Lokasi Penelitian di Kabupaten Ngawi dan situs penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Instrumen Penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi (1992, h.20). Analisis model interaktif melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Pembahasan

1. Pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi

a. Tahap perawatan balita gizi buruk dan sangat kurus

Program Restu Ibu dibuat untuk menangani gizi buruk balita, yang memiliki beberapa gerakan dan tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk, namun oleh peneliti dikelompokkan agar lebih terkoordinir ketika penelitian. Sesuai dengan yang diungkapkan Wahab (1991, h.67), implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk UU, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Pada tahap perawatan balita gizi buruk dan sangat kurus terdapat lima gerakan didalamnya, yaitu:

1. Tahap perawatan balita gizi buruk dan sangat kurus

Balita yang sudah terdaftar mendapat penanganan, ruang khusus di RSUD dr. Soeroto dan bagi balita gizi buruk yang memiliki penyakit penyerta diberikan penanganan di TFC (*Therapeutic Feeding Centre*) lama perawatan selama 12 hari.

2. Pemulihan balita gizi buruk dan sangat kurus paska perawatan

Upaya pemulihan dan tindakan lanjut bagi balita gizi buruk dan sangat kurus paska perawatan di RSUD dr. Soeroto dan Puskesmas selain itu juga untuk meningkatkan status gizinya. Dengan metode Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT yang diberikan ada empat jenis yaitu Entrakid, Vinerol, Susu Lactogen dan Biskuit Sun. Pelaksananya berasal dari orang tua kandung atau pengasuh balita yang didampingi kader posyandu atau pos gizi atau PKK yang dibimbing langsung oleh petugas kesehatan.

3. Revitalisasi posyandu dan surveilence berbasis masyarakat

Merupakan upaya pemenuhan kesehatan dasar balita, peningkatan status gizi berbasis masyarakat, pemantauan dan pelacakan kasus gizi oleh masyarakat. Disini masyarakat dilibatkan dengan melakukan pertemuan setiap bulannya yang biasanya dengan memberikan arahan tentang gizi yang baik bagi balita. Selain itu masyarakat juga dapat bertukar informasi tentang gizi balitanya. Pada gerakan ini pendekatan melalui penguatan diberikan yaitu dengan memberikan informasi pada orang tua dan masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi.

4. Pendampingan balita-balita gizi buruk

Merupakan upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan status gizi dan status kesehatan balita, dalam mengatasi kendala yang berkaitan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan. Yang dilakukan para kader posyandu, PKK, orang tua asuh balita gizi buruk dan tenaga kesehatan.

5. Pos gizi

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua asuh atau pengasuh balita dalam hal pola asuh gizi, perilaku hidup bersih dan sehat serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap gizi buruk di wilayahnya. Pos gizi pada tahun 2012 terdapat di 13 kecamatan dan bertambah pada tahun 2013 menjadi 19 kecamatan.

b. Bantuan untuk peningkatan status gizi balita gizi buruk

Pada pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu), Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait serta masyarakat guna mendukung berjalannya program ini dengan baik, kerjasama yang dilakukan dikemas melalui gerakan yang ada di program Restu Ibu, yaitu:

1. Program bantuan keuangan desa untuk peningkatan pengadaan induk ayam buras petelur kepada keluarga balita gizi buruk. Hal ini bertujuan untuk membantu menunjang gizi utama harian balita, agar tetap terjaga dengan membudidayakan ayam di pekarang rumah balita gizi buruk.
2. Program orang tua asuh balita kurang gizi. Bertujuan untuk membantu memantau status gizi balita agar dapat mencapai status gizi yang diinginkan dengan memberikan dukungan baik secara moril atau finansial.
3. Program peningkatan ketahanan pangan. Kegiatannya dengan membagikan bibit sayuran siap buah yang digunakan untuk menunjang asupan makan harian balita gizi buruk agar tetap terjaga.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi

Pada pelaksanaan program Restu Ibu dalam menangani gizi buruk di Kabupaten Ngawi terdapat faktor pendukung, yaitu adanya komitmen kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi, yaitu berpindahnya tempat tinggal balita gizi buruk yang menjadi sasaran yang dapat menyulitkan atau memutuskan pemantauan yang telah dilakukan dan adanya kasus baru yang muncul setiap saat.

Kesimpulan

Pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk sehingga pada saat pelaksanaan memiliki tujuan dan hasil pasti, untuk mewujudkannya melalui intervensi yang ada dalam program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) bagi balita gizi buruk di Kabupaten Ngawi. Faktor pendukungnya yaitu adanya komitmen kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah sedangkan faktor penghambatnya yaitu berpindahnya tempat tinggal balita gizi buruk yang menjadi sasaran

yang dapat menyulitkan atau memutuskan pemantauan yang telah dilakukan dan adanya kasus baru yang muncul setiap saat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemantauan balita yang berpindah tempat tinggal tetap dilakukan melalui komunikasi dengan pihak keluarga.
2. Sebaiknya dalam program ini ditambahkan cara pencegahan bagi balita gizi buruk yang belum terkena gizi buruk.

Daftar Pustaka

- Arnelia. (2011) **Kajian Penanganan Anak Gizi Buruk dan Prospelnya (*Management of Severe Malnutrition and It's Prospect: A Review*)**.
- Budiardjo. (2008) **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Krisnasari. (2010) **Nutrisi dan Gizi Buruk**. Vol.4 Nomor. 1.
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2013 tentang **Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk**. Ngawi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). (2009). **Kamus Gizi: Pelengkap Kesehatan Keluarga**. Jakarta, Kompas.
- Suharto, Edi. (2005). **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Aditama.
- Suhendra, K. (2006). **Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat**. Bandung, Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (1991). **Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**. Jakarta, PT. Bumi Aksara.